

PERAN BAHASA DALAM RUANG LINGKUP POLITIK

Oleh: Dra. Christina Purwanti, M.Pd

(Dosen Bahasa Indonesia, Universitas Pelita Harapan).

Abstrak

Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi sosial bagi penggunanya. Sebagai alat komunikasi, bahasa sangat efektif untuk menyampaikan pikiran, perasaan, maksud ataupun suatu tujuan kepada orang lain. Saat ini bahasa juga dijadikan sebagai alat penyampai pesan melalui media sosial dalam ruang politik. Banyak orang yang memanfaatkan peran bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas tentang politik. Bahasa memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Melalui bahasa setiap orang dapat berkomunikasi melalui pesan teks. Selain itu pengguna bahasa dapat juga memberikan informasi berupa gambar, suara, dan video dengan lebih leluasa tanpa batas. Penggunaan bahasa dalam menyampaikan pesan dan informasi melalui dalam ruang politik perlu dikaji lebih mendalam karena pengaruh bahasa dalam perkembangan dapat bersifat positif maupun negatif; yang secara spesifik dapat disebut sebagai distorsi bahasa terutama berkaitan dengan tiga hal penting, yaitu: makna, nilai, dan tujuan bahasa dalam bahasa itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan interdisipliner.

Kata kunci: bahasa, kekuasaan, komunikasi, politik

PENDAHULUAN

Dalam dunia dewasa ini yang ditandai dengan era digital, kemampuan manusia untuk menyebarkan informasi secara bebas selalu saja hadir dalam jagad media. Dalam wacana politik, berbagai pengetahuan dapat diproduksi oleh siapa pun melalui berbagai respon dan komentar yang selalu saja hadir di media sosial serta terus menyebar ke masyarakat luas. Utamanya adalah informasi tersebut bersifat logis, maka dampak langsung informasi tersebut cepat saja menjadi tersebar dalam berbagai ruang lingkup termasuk dalam ruang lingkup politik. Dalam dunia jagad media, apa yang disebut sebagai gerakan sosial baru, selalu saja juga memanfaatkan media sosial untuk membangun berbagai simpati dan terus saja mengumpulkan massa pendukung berdasarkan logika berpikir, sehingga muncullah dalam media sosial berbagai argumen lewat *discourse* yang terjadi apalagi berkaitan langsung dengan politik (Galuh, 2016, 87).

Dalam komunikasi politik yang berkembang di dalam media sosial, sebuah informasi yang diterima lewat media massa walaupun dalam komentar *online* pun lebih gampang diterima adalah dengan menggunakan referensi atau disebut sumber rujukan ketika mengomentari atau memberikan argumentasi tentang sebuah peristiwa. Seringkali orang menggunakan rujukan dalam media sosial

adalah berita *online*. Namun dalam menggunakan berbagai rujukan yang tersedia pada media sosial, selalu saja berbeda dengan sumber perdana atau sumber perimernya.¹

Bagaimana caranya untuk memperhatikan peran sebuah bahasa dalam ruang lingkup politik yang tentu terjadi adanya distorsi bahasa di dalam politik. Ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait langsung dengan distorsi bahasa dalam ruang lingkup politik yakni, **pertama** perlu dipahami secara ontologis mestinya dikenali sejumlah jenis realitas yang terjadi,² seperti terdapat adanya realitas yang secara aktual terjadi di alam semesta sebelum dijamah secara saksama oleh berbagai panca indra dan argumentasi pemikiran manusia. Berbagai realitas yang secara faktual hadir, selalu saja bersifat sangat kompleks, sangat menentukan berbagai rangkaian sebab akibat atau kausalitas dengan berbagai kronologinya. Hal tersebut memungkinkan beberapa hal penting yakni: Pertama, banyak varian yang sungguh mempengaruhi berbagai realitas aktual yang sangat beragam dengan kuantitas yang hadir tidak terbatas. **Kedua**, eksistensi realitas pikiran adalah abstraksi yang telah terbentuk dalam seluruh pepikiran manusia dari hasil pengolahan atau penangkapan indrawi atas fakta realitas yang ada pada lingkungan di sekitarnya. Beragam Realitas pikiran tersebut terbentuk sesuai kapasitas apa yang disebut sebagai intelektual preferensi ideologis yang berasal dari seseorang. Demikian juga terjadi pada misalnya hasil “rekaman pikiran” dua orang berbeda atas objek yang sama pun, dapat saja selalu berbeda satu terhadap yang lainnya karena terjadi perbedaan fokus atau sudut pandang yang beragam, dan proses pengolahan secara kognitif, afektif pun dari masing-masing orang secara berbeda. **Ketiga**, berbagai realitas tuturan yaitu realitas dengan apa yang disebut sebagai realitas yang direkonstruksi seseorang selalu melalui bahasa, dan selalu berdasarkan kemampuan linguistik yang sering dinamakan *description linguistic* yang dimilikinya.

Sebagaimana mestinya bahasa, hakikatnya netral, tidak ada bahasa yang bernilai baik atau buruk. Bahasa adalah sistem isyarat yang mengantarkan siapa pun penuturnya dapat mencapai tujuan yang baik atau pun yang buruk. Bahasa menunjukkan berbagai frasa, klausa, dan berbagai kalimat untuk melukiskan berbagai objek. Tuturan bahasa akan menjadi bermakna apabila bahasa tersebut dibatasi oleh penuturnya (Nasution, 2007).³

¹ Lihat, Lihat Distorsi Komunikasi Pembangunan Pemerintahan Presiden Jokowi di Media Sosial Pajar Hatma Indra Jaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281.

² Lihat, Fathur Rokhman, Surahman, *Politik Bahasa Pengauasa*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2018, hlm. 243-244.

³ Lihat, Nasution, dalam **Hanifah Islamiyah** Universitas Diponegoro DOI: <https://doi.org/10.32534/jike.v4i2.1662>

Para penutur, dalam menyampaikan pesan melalui media sosial pada ruang lingkup politik terjadi keterbatasan makna dan juga perluasan makna untuk dipahami secara utuh yang membuat realitas makna dalam media sosial menjadi tidak utuh secara *linguistic description*. Sering juga dalam media sosial terjadi kekaburan makna yang membuatnya berjarak, berbeda, atau pun berlainan dengan realitas yang ada secara aktual. Terjadi juga berita berjarak dengan realitas aktualnya karena adanya keterbatasan kemampuan penuturnya ketika ia mengungkapkan pikirannya. Sering juga terjadi penyederhanaan dan juga pengurangan, dan juga adanya penambahan ketika penutur berproses kreatif merangkai berbagai informasi yang didapatinya dengan bahasa yang dimilikinya.⁴

PEMBAHASAN

Eksistensi Bahasa dalam Wacana Komunikasi Politik

Bahasa dalam eksistensinya selalu digunakan sebagai alat ucap dalam berkomunikasi, langsung, tidak langsung yang selalu digunakan kapan saja dan dimana saja untuk menyampaikan makna yang ada dalam pikirannya, dan nilai yang mau diambil dari seluruh isi bahasanya. Habermas mengatakan bahwa setiap bahasa yang diucapkan selalu memiliki kepentingan, khususnya kepentingan seorang penutur, yang tentu di dalamnya pun menyiratkan makna kekuasaan. Bahasa selalu tidak netral. Teks bahasa selalu direlasikan dengan konteks yang sedang dibahas atau pun yang sedang diperjuangkan dalam perjuangan politik, mulai dari tema, sampai pada maksud-maksud yang termaktub di dalamnya yang tentunya penuh dengan berbagai strategi politik dalam komunikasi politik, yang semuanya dipahami di dalam bahasa. Lewat ucapan verbal atau non verbal, seorang komunikator politik atau penguasa politik dapat menyiratkan maksud utama pesannya yakni bagaimana ia dapat mempertahankan sebuah kekuasaan.

Terminologi wacana, menurut pendapat Foucault (1972)¹⁰ penggunaan bahasa dalam berkomunikasi harus memperhatikan wacana sosial dan seluruh prosesnya saling berkompetisi dalam suatu pengorganisasian. Menurut Rakhmad seperti terdapat dalam Foucault, bahwa bahasa dalam wacana sebagai sebuah aspek sentral; bahwa makna dan nilai ideologi dapat tersampaikan lewat bahasa. Seorang pemikir, Oduori (2002) di Kenya, dalam studinya mengatakan bahwa, peran bahasa dalam arena politik selalu digunakan oleh para pemimpin dalam mempertahankan seluruh otoritas kekuasaannya yakni lewat pemanipulasian makna bahasa. Dalam konteks Indonesia, seluruh studi bahasa dan teks dalam komunikasi politik, selalu saja ditafsirkan maknanya. Seperti

⁴ Lihat, Michael, Foucault, *The Archaeology of Knowledge & The Discourse on Language*. New York: Pantheon Books, 1972, hal, 57, Lihat Fathur Rokhman, Surahman, *Politik Bahasa Pengusaha*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2018, Op.cit., hlm 244.

Sam Mukhtar Canosgo, membuat sebuah kajian tentang banyak hal antara lain tentang hermeneutis historis terhadap sebuah teks dan dokumen-dokumen kebijakan lainnya pada masa Orde Baru.

Bahasa Kekuasaan dalam Wacana Komunikasi Politik

Dalam perspektif komunikasi politik, setiap kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi selalu digunakan untuk melakukan pengontrolan; itulah yang disebut bahasa kekuasaan. Jumlah kekuasaan sangat ditentukan oleh banyaknya relasi yang dibangun oleh segenap anggota dalam suatu komunitas, yang selalu bekerja sama dari waktu ke waktu yang terjadi di tempat yang sama dan pada waktu yang sama yang terjadi lewat bahasa⁵ dengan uraiannya sebagai berikut: Pertama, kekuasaan itu dapat dipraktikkan dalam artian fungsinya sebuah kekuasaan mestinya terlihat secara jelas dan dapat dipraktikkan agar bisa dinilai tingkat pergeserannya. Kedua, bekerjanya sebuah kekuasaan dapat terjadi di dalam sebuah aturan, sistem dan regulasi yang ada di dalamnya. Ketiga, model kekuasaan ini beroperasi melalui normalisasi dan juga dalam sebuah regulasi. Keempat kekuasaan itu bersifat produktif, dalam artian jika keseluruhan makna kekuasaan tersebut dipahami secara baik dan benar dalam bahasa yang sebenarnya, maka kekuasaan menjadi sangat dinamis dan menjadi tidak kaku. Seseorang yang memiliki kekuasaan, secara terus menerus melakukan konsolidasi terhadap segala hal yang terjadi secara langsung lewat budayanya; dan di sanalah peran bahasa sebagai sebuah strategi yang dapat digunakan oleh siapa saja.

Fairlog, dalam Benedict Anderson dalam pandangannya tentang wacana, menyampaikan pemikiran dalam beberapa hal penting yakni: pertama, keterkaitan antara wacana sebagai simbol yang menunjuk pada sebuah kekuasaan yang secara nyata. Kedua, kekuasaan merupakan hal yang bersifat artifisial yang tetap dan terus-menerus diperjuangkan.; hal ini dinamakan sebagai: di belakang wacana terdapat kekuasaan; dan inilah yang terus menerus terjadi dalam sebuah perjuangan dalam komunikasi politik. Wacana tentang komunisme misalnya, selalu menguat dalam rezim Soeharto.⁶ Wacana ini masuk dalam seluruh level kehidupan masyarakat, mulai dari masyarakat pada lapisan bawah yang disebut masyarakat proletar dan masyarakat pada lapisan atas yang disebut dengan elit politik. Sebetulnya wacana tersebut digunakan secara ampuh dalam berkomunikasi melalui bahasa untuk mendiskreditkan pemerintahan Soekarno yang tidak melihat hal-hal yang bersifat positif yang berada di dalamnya. Kepemimpinan pada zaman Soeharto

⁵ Ibid., hlm. 58.

⁶ Lihat, Benedict Anderson, "The Languages of Indonesia Politics", Indonesia, No. 1, Spring Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1966.

menjadi sangat dinamis dengan memperhatikan pertautan yang terjadi antara bahasa dan kekuasaan. Para pemimpin bertindak sebagai pengendali sejarah berdasarkan kepentingan politik yang terus terlihat dalam komunikasi politiknya

Relasi Bahasa dan Kekuasaan

Jika dilihat secara gamblang, terjadi distingsi atau perbedaan yang cukup tajam antara bahasa dan kekuasaan yang terus dilihat secara terpisah⁷. Bahasa, khususnya ragam bahasa selalu terbangun dalam kata, kalimat, paragraf dan akhirnya membentuk sebuah teks, yang berada di dalam sebuah konteks tertentu. Sedangkan kekuatan bahasa dapat terlihat pada para politisi yang menggunakan bahasa dalam seluruh prospek komunikasi politik yang terjadi.

Konsekuensi selanjutnya yang terus terlihat antara politik dan bahasa adalah pemahaman bahasa yang kemudian disebut linguistik deskriptif. Sedangkan pemahaman bahasa dalam komunikasi politik disebut sebagai politik bahasa, karena mempersempit makna sesuai kondisi politik yang terjadi.

Pemahaman bahasa seperti tergambar di atas, maka jelas antara bahasa dan komunikasi politik, 'tidak ada' titik temu karena sangat berbeda kajiannya. Titik kajian bahasa masuk dalam linguistik, sedang titik kajian komunikasi politik masuk di dalam kepentingan politik. Perjumpaan bahasa dan kekuasaan dapat dimaknai setelah kaum *post strukturalis* seperti Habermas dkk, mengatakan bahwa dalam hidup manusia, betapa pentingnya dan urgennya bahasa dan kekuasaan.⁸

Kaum *post-strukturalis*⁹ juga dapat menerima dan membuka diri untuk menerima bahwa bahasa pun diperoleh melalui dimensi fungsi bahasa, seperti lazimnya dilakukan oleh seorang dosen bahasa yang melakukan kajian lewat studi kepustakaan, karena itu dalam berkomunikasi, ilmu bahasa bisa membawa pengguna bahasa sesuai dengan teks dan konteksnya seperti sebuah teks yang sebenarnya. Di sinilah bahasa lahir dan hadir secara fungsional dalam komunikasi politik dan tampak sebagai sebuah disiplin ilmu yang disebut sebagai makro linguistik karena fungsi bahasa memiliki ruang lingkup yang sangat luas.

⁷ Christina Purwanti, "Analisis Krisis atas Bahasa Hukum dan Distorsi Bahasa dalam Hukum", JurnalLawReview UPH, Volume XIV, No 3- Maret 2016. hal, 458.

⁸ William Ebenstein, *Great Political Thinkers, Plato to the Present*, New York, Printed in the United States of America, 1960, hlm. 257.

⁹ F. Budi Hardiman, lihat pada bagian, menafsir teks, op.cit., hal. 48.

Manusia sebagai pemilik bahasa dengan berbagai unsur budaya yang tercerap dalam pergaulan antar budaya, di mana pengguna bahasanya ada di dalam beraneka suku dan budaya serta beragam akar budayanya, yang lazim disebut multikulturalisme. Penggunaan bahasa dalam kaitan langsung dengan kekuasaan politik dewasa ini sering terjadi kesalahpahaman karena masuk dalam kultur budaya yang selalu tidak sama dalam kehidupan manusia.

Wacana bahasa dalam komunikasi dapat sejalan dengan arena di mana sebuah kekuasaan beroperasi yang selalu berkaitan erat dengan relasi kekuasaan yang sangat muda untuk dipahami antara bahasa dan kekuasaan dalam pandangan Anthony Gramsci yaitu bahasa yang bersifat koersif dan bahasa yang bersifat hegemoni.¹⁰

Bahasa dan Kebudayaan

Dalam berbahasa, muncullah berbagai ragam makna budaya yang disebut ragam budaya yang sebetulnya terlihat secara jelas sosoknya melalui bahasa. Dalam konteks ini, ragam budaya bukan hadir dalam sebuah makna tunggal melainkan bermakna jamak karena mendapat pengembangan lewat bahasa. Bahasa dengan berbagai kekhasannya dapat hadir untuk mengafirmasi budaya secara langsung, dan dalam konteks ini lahirlah apa yang dinamakan dengan ragam bahasa. Bahasa dan budaya secara timbal-balik saling memaknai secara memadai.

Bahasa bisa menjadi alat komunikasi atau instrumen fundamental dalam mengidentifikasi budaya. Sementara makna budaya itu sendiri dalam pemahaman atau konteks ini adalah sesuatu yang superorganik dalam pengertian bahwa kebudayaan itu sendiri akan tetap hidup meskipun masyarakat yang mewarisinya memberi *form* atau bentuk secara berbeda. Selanjutnya dalam konteks ini perlulah diingat bahwa adalah tidak patut dalam menilai, mana kebudayaan yang dinamakan kebudayaan purba dan mana kebudayaan yang disebut sebagai kebudayaan yang maju. Semua kebudayaan adalah baik dan benar dalam dirinya.

Para penutur bahasa ketika berbicara atau berkomunikasi tentang kebudayaan sebagai suatu gaya hidup, tentu mereka tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa dalam hal apa pun kebudayaan mempunyai ciri universal. Sebagai satu fenomena manusiawi kebudayaan itu universal sifatnya. Sejauh mana satu gaya hidup kebudayaan-kebudayaan yang ada berbeda satu dengan

¹⁰Lihat, Mudjia Rahardjo, Bahasa dan Kekuasaan, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/95.html?task=view>, diakses 05 September 2021.

yang lain. Tambahan lagi, setiap kebudayaan mempunyai dasar yang dianut oleh masyarakat bahasa sebagai satu nilai yang sangat tinggi. Dengan demikian kebudayaan tertentu yang khas untuk masyarakat bahasa tertentu tidak niscaya cocok untuk masyarakat bahasa lain karena pada umumnya kebiasaan dan cara hidup serta cara berbahasa setiap masyarakat adalah sangat berbeda satu sama lain. Karena itu pula ada satu hal penting yang bisa dikatakan tentang kebudayaan dan bahasa yakni kebudayaan dalam kenyataannya beragam jenisnya sesuai dengan majemuknya kelompok masyarakat bahasa. Setiap kebudayaan menjawab atau memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu cara yang amat spesifik sesuai kehendak masyarakat pengguna bahasa.

Masyarakat bahasa bisa secara terus menerus berkorelasi dengan budaya pada sekelompok orang, yang juga mempunyai kebudayaan yang sama. Pada bagian ini terdapat peran sentral dari masyarakat bahasa sebagai alat utama atau instrumen pemungkas dalam menampilkan sosok budaya. Masyarakat bahasa, pada saat yang sama sekaligus berperan untuk menyaring, memodifikasi serta bisa mentransformasi kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan dapat menjadi lebih baik dan berhasil dalam pengadaptasian terhadap berbagai bentuk penyesuaian fisik, sosial, dan lingkungan untuk menjawab berbagai problema manusia dalam sebuah bangsa.

Ilmu Pengetahuan, teknologi dan ekonomi adalah nilai-nilai dominan yang mempengaruhi perubahan masyarakat dalam kebudayaan modern (S. Takdir Alisjahbana, 1982). Kemajuan ilmu dan teknologi canggih sangat berpengaruh pada perubahan sosial. Misalnya teknologi canggih yang berhubungan dengan aspek-aspek *sibernetika*, *rekayasa sosial* dan *rekayasa biologis*. Sibernetika mengacu kepada penerapan teknologi otomatisasi dan komputerisasi. Otomatisasi dan komputerisasi (*cybernation*) berpengaruh besar terhadap hubungan sosial di mana diterapkannya. Di samping itu penerapan otomatisasi dan komputerisasi akan meningkatkan alternatif sosial dalam kehidupan masyarakat. Realitas sosial dari hubungan-hubungan sosial menjadi retak, yang pada gilirannya melemahkan solidaritas sosial.¹¹

Transformasi budaya yang disebabkan oleh penerapan teknologi maju akan menimbulkan semakin akrabnya hubungan manusia dengan teknologi. Apabila hubungan ini berakibat manusia dikendalikan oleh teknologi maka nilai-nilai dasar budaya yang dimiliki manusia akan mengalami erosi. Kebudayaan modern teknologi humanoid, seperti yang dilakukan oleh Alvin Toffler dalam

¹¹ Lihat, Suyatno Kartodirdjo., dalam, G. Moedjanto,dkk., *Tantangan Kemanusiaan Universal*, Yogyakarta, Kanisius,1993, hlm. 144.

bukunya *Future Shock* (1970),¹² telah mengembangkan teknologi robot yang mampu mengganti tugas-tugas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi robot telah mengembangkan robot-robot dapat menangis, menyeringai, tersenyum dan berbuat apa saja. Bahkan ahli-ahli teknologi robot di Amerika Serikat memperkirakan bahwa pada abad ke-21 bukan mustahil akan terjadi hubungan seksual antara manusia dengan robot, yang terbuat dari plastik bening yang menyerupai manusia.

Pembudayaan teknologi maju yang terlepas dari perspektif budaya bangsa akan mengakibatkan manusia akan dikuasai teknologi, dan bukan sebaliknya. Di Indonesia, oleh karenanya pembangunan dan penerapan teknologi maju harus mempunyai fungsi sentral untuk menjaga nilai-nilai dasar dari budaya bangsa, sehingga manusia Indonesia tidak dikendalikan oleh teknologi. Dengan demikian transformasi budaya akan tetap dinamis terikat dengan nilai-nilai dasar budaya bangsa dan kepribadian bangsa.

Pembudayaan teknologi harus ditujukan ke arah pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat. Tanpa memperhatikan hal-hal tersebut maka transformasi budaya yang terjadi dalam proses pembangunan ini akan menimbulkan berbagai masalah, antara lain yaitu: Pertama, masalah ketahanan budaya dan konflik nilai. Kedua, masalah komersialisasi budaya. Ketiga, masalah materialisme dan konsumerisme. Keempat, masalah konflik sosial yang terjadi dalam ruang lingkup politik.

PENUTUP

Transformasi budaya melalui bahasa merupakan perubahan yang menyangkut nilai-nilai dan struktur sosial. Proses perubahan struktur sosial akan menyangkut masalah-masalah disiplin sosial lainnya termasuk solidaritas sosial, keadilan sosial, sistem sosial dan mobilitas sosial dalam suatu masyarakat. Transformasi budaya yang tidak berakar pada nilai budaya bangsa akan mengendorkan disiplin sosial dan solidaritas sosial. Dan pada gilirannya unsur keadilan sosial akan sukar diwujudkan dalam sebuah bangsa.

Peran bahasa dalam sistem sosial masyarakat modern terdapat kecenderungan kuat terbentuknya kekuatan-kekuatan politik yang melahirkan kelompok-kelompok sosial yang sangat dominan, sehingga mempersulit mobilitas sosial bagi lapisan sosial bawah atau lapisan orang miskin. Kecenderungan semacam ini sebenarnya merupakan implikasi dari transformasi budaya

¹² Lihat juga Alvin Tofler, *Future Shock, Kejutan Masa Depan*, bagian: Keanekaragaman Gaya Hidup, Jakarta, Pantja Simpati, 1992, hlm, 171-172.

melalui bahasa yang harus dipecahkan permasalahannya sehingga pembangunan politik di suatu negara tetap mempunyai arah yang jelas. Semuanya dipahami lewat bahasa yang digunakan.

Hanya dengan bahasa atau melalui bahasa, setiap manusia dalam berkomunikasi dapat memahami segala realitas di luar dirinya dan terus menatanya menjadi sebuah rangkaian pesan atau informasi yang bernilai dalam ruang lingkup politik. Bahasa digunakan oleh setiap penutur bahasa untuk merangkai berbagai konsep dan informasi yang disampaikan termasuk informasi tentang pembangunan bangsa dan ruang politik. Setiap penutur bahasa dalam ruang lingkup politik selalu memanfaatkan bahasa sebagai instrumen sentral untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas tentang politik itu sendiri. Instrumen bahasa pun selalu memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi satu terhadap yang lain tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan kata lain, bahasa memainkan peran sentral bagi setiap orang untuk berkomunikasi. Selain itu pengguna bahasa dapat memberikan informasi dan pesan dengan beragam cara, untuk mencapai maksud dan tujuan sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson Benedict, "The Languages of Indonesia Politics", Indonesia, No. 1, Spring Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1966.
- Akbar, Ali, *9 Ciri Negatif Manusia Indonesia* (Penaku : 2011).
- Amdjat, Mudzakir, *Menunggu Nasib Venezuela*; <http://www.merdeka.com/khas/menunggu-nasib-venezuela-kolom-dunia.html>, Jumat, 28 Februari 2014.
- Bertens, K., *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1975.
- Ebenstein William, *Great Political Thinkers, Plato to the Present*, New York, Printed in the United States of America, 1960.
- Foucauld, Michael, *The Archaeology of Knowledge & The Discourse on Language*. New York: Pantheon Books, 1972.
- Halim, Amran (Editor), 1980, *Politik Bahasa Nasional I*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Harrison, Lawrence E. & Samuel P. Huntington (ed.) *Culture Matters*, (New York: Basic Books, 2000).
- Herudin, Yudi Latif : *Revolusi Mental Solusi Kemajuan Bangsa*, <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/08/25/yudi-latif-revolusi-mental-solusi-kemajuan-bangsa>.
- Harrison, Lawrence dan Samuel P. Huntington (2006), *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*. Terj. Retnowati, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Husen, Ida Sundari dan Rahayu Hidayat (2001), *Meretas Ranah Bahasa, Semiotika dan Budaya*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Islamiyah Islamiyah Universitas Diponegoro DOI: <https://doi.org/10.32534/jike.v4i2.1662>
- Kartodirdjo Suyatno., dalam, G. Moedjanto, dkk., *Tantangan Kemanusiaan Universal*, Yogyakarta, Kanisius, 1993.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, cet-4, 1977). Kompas, *Daya Saing Jadi Kunci : Budaya Jangan Berkutat dengan Retorika*, 17/9/2014.
- Kurniawan, Bagus, *Jokowi: Pembangunan Manusia yang Paling Sulit Dihadapi*, news.detik.com/read/2014/08/18/225719/2665811/1562/jokowi-pembangunan-manusia-yang-paling-sulit-dihadapi.

- Stiglitz, Joseph E, & Shahid Yusuf (ed.), *Rethinking the East Asian Miracle*, (Oxford University Press, 2001).
- Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto (2005), *Teori-teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius. Triyana, Bonnie (2011), *Eddie Lembong Mencintai Tanah Air Sepenuh Hati*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Tofler, Alvin, *Future Shock, Kejutan Masa Depan*, bagian: Keanekaragaman Gaya Hidup, Jakarta, Pantja Simpati, 1992
- Stiglitz, Joseph E, & Shahid Yusuf (ed.), *Rethinking the East Asian Miracle*, (Oxford University Press, 2001).
- Thung Ju Lan dan M. Azzam Manan (2011), *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*, Jakarta: LIPI Press.
- Kridalaksana, Harimurti, 1982, *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*, Nusa Indah, Ende – Flores.
- Mudjia Rahardjo, Bahasa dan Kekuasaan, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/95.html?task=view>, diakses 05 September 2021.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Purwanti, Christina: “Analisis Kritis Atas Bahasa Hukum dan Distorsi Bahasa dalam Hukum,” *Law Review*, Volume XIV, No. 3 - Maret 2015, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- Pureklolon Thomas Tokan., *Komunikasi Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016
- Rahardjo Mudjia, Bahasa dan Kekuasaan, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/95.html?task=view>, diakses 05 September 2021.
- Rokhman Fathur, Surahman. (2018,, *Politik Bahasa Penguasa*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2018.